KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

			· <u>-</u> <u>-</u>				
VENENTEDIAN VENANCAN DI		H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 1 3 3 8			H.4 X Final		
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan			H.5 Tidak Final		
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG							
A.1 NPWP : 80 308 282 5 726 000							
A.2 NIK :							
A.3 Nama : ELDA TRIALISA PUTRI							
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG							
MASA PAJAK (mm-yyyy)	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
4	21-402-01	612.400	612.400	0	5	30.620	
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota							
Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 037/SP2D-LS/BLUD-RSJDAHM/IV/2022							
Nama Dokumen Biaya Pembayaran Tanggal 1 3 dd 0 4 mm 2 0 2 2 yyyy							
B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.							
Nomor : Tanggal dd mm yyyy							
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :							
B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :							
O IDENTITAG DEMOTONO DA IAK							
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK							
C.1 NPWP Instansi Pemerintah : C.2 Nama Instansi Pemerintah :		9 5 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0 0 RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR					
						7	
	Organisasi :					_	
		1 3 dd 0 4 mm 2 0 2 2 yyyy					
rtaina i one							
C.6 Pernyataar	і Wajib Pajak :	tandatangani secara elektronik		tan Unilikasi telah sa	ya isi dengan	benar dan telah saya	
		Sesuai dengan ketentuan yang elektronik sehingga tidak diper	g berlaku, Direktorat Jenderal Pajal lukan tanda tangan.	s mengatur bahwa do	kumen ini tel	ah ditandatangani secara	

J13J4OCN